

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN RENCANA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN
2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur tentang penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Dimana pada Pasal 367 ayat (2) Permendagri No.86 Tahun 2017 menyebutkan penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan dan sesuai Pasal 368 Permendagri No.86 Tahun 2017 menyebutkan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2022, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2022. Perbedaan asumsi tersebut salah satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang harus disesuaikan agar dapat dipergunakan untuk tahun berjalan. Perbedaan-perbedaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan RKPD untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan daerah. Perubahan RKPD ini dimungkinkan dan sesuai dengan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD

dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya dan harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan evaluasi Renja Perangkat Daerah Dishub tahun 2022 pada Triwulan I dan II, terdapat perkembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang kurang sesuai dengan asumsi awal disusun Renja PD Dishub, yaitu meliputi penyesuaian masalah pembangunan, penambahan dan pengurangan kegiatan dalam upaya pencapaian penyelesaian permasalahan. Oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukannya perubahan Renja PD Dishub tahun 2022.

Renja PD tahun 2022 secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, meliputi:

- a. Merupakan instrumen pelaksanaan Renstra PD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan
- b. Menjadi acuan penyusunan Perubahan program/ kegiatan PD.
- c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran Renstra Dishub Kabupaten Klungkung.
- d. Menjadi instrumen dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-P.
- e. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020;
22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 7 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Klungkung nomor 78 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Dishub dalam rangka menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2022,
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Perangkat Daerah Dishub Kabupaten Klungkung,
3. Sebagai pedoman target yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2022 serta anggaran yang dibutuhkan.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Perubahan Renja Perangkat Daerah Dishub Kabupaten Klungkung Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra PD.
- 2.2. Permasalahan Pelayanan PD

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Perubahan Target Kinerja Prioritas PD
- 3.2. Perubahan Program dan Kegiatan prioritas PD

Bab IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra PD.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Perhubungan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung. Rincian program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2022 disampaikan pada Tabel 2.1 dan 2.2

Tabel 2.1
Rencana Program dan Kegiatan Dishub Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Tahun Kinerja Program
1	2	3	4				5	6	Tahun 2022
Meningkatkan Pelayanan Transportasi Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan	1. Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat 2. Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
			2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
			2	15	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA .	Indek Reformasi Birokrasi .	21 Poin
			2	15	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .	Nilai SAKIP Perangkat Daerah .	86 Poin
			2	15	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah .	jumlah dokumen anggaran dan perencanaan perangkat daerah tersusun tepat waktu .	9 dokumen
			2	15	1	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah terkirim tepat waktu .	24 laporan
			2	15	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu .	3 laporan
			2	15	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN .	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN .	13 bulan
			2	15	1	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD .	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD tersusun tepat waktu .	14 laporan
			2	15	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah .	Tingkat Disiplin Aparatur .	95 persen
			2	15	1	2.05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian .	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu .	100 persen
			2	15	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah .	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi .	100 persen
			2	15	1	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor .	Persentasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor .	90 persen
			2	15	1	2.06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD .	cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat .	100 persen
			2	15	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) .	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .	90 persen
			2	15	2	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota .	Persentase pemenuhan jaringan LLAJ Kabupaten .	90 persen
			2	15	2	2.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota .	Persentase pemenuhan manajemen lalu lintas .	100 persen
			2	15	2	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota .	Persentase pemenuhan perlengkapan jalan di jalan kabupaten .	60 persen
			2	15	2	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota .	persentase pemenuhan fasilitas lalu lintas di jalan kabupaten .	60 persen
			2	15	2	2.02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan .	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan jalan di kabupaten .	80 persen
			2	15	2	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C .	Terpenuhinya pengelolaan prasarana terminal tipe C .	80 persen
			2	15	2	2.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal .	Terpenuhinya pengelolaan terminal tipr C .	75 persen
			2	15	2	2.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) .	Terpenuhinya pembangunan dan pemeliharaan terminal Tipe C .	75 persen

						Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir .	Terpenuhinya pengelolaan prasarana parkir di kabupaten .	80 persen
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik .	Terpenuhinya penyelenggaraan dan pengembangan pengelolaan parkir kewenangan kabupaten .	80 persen
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota .	Terpenuhinya pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten .	75 persen
						Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor .	Persentase pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji di kabupaten .	100 persen
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor .	persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor .	80 persen
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor .	Pemenuhan sumber daya manusia pengujian kendaraan bermotor .	85 persen
						Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor .	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor .	100 persen
						Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor .	Strandar Operasional Prosedur Pengujian Berjalan dengan baik .	100 persen
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor .	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor .	80 persen
						Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor .	Terselenggaranya Pengujian Kendaraan bermotor di Nusa Penida dan Nusa Lembongan .	100 persen
						Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota .	Persentase Persetujuan Hasil Andalali untuk Jalan Kabupaten .	70 persen
						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin .	Presentase Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin .	70 persen
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan .	Persentase pemenuhan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan .	80 persen
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota .	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Norma Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan dalam Penilaian WTN (%) .	70 persen
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum .	Presentase sosialisasi keselamatan Lalu Lintas yang dilaksanakan (%) .	80 persen
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota .	Persentase pemenuhan layanan Angkutan Umum dalam Kab. Klungkung .	80 persen
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota .	Persentase pemenuhan layanan Angkutan Umum Darat/Angsis dalam Kab. Klungkung .	70 persen
						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota .	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum dalam 1 Kabupaten .	100 persen
						Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota .	Persentase pemenuhan layanan angkutan perkotaan dalam 1 kabupaten .	80 persen
						Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota .	Terlaksananya sosialisasi kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten .	80 persen
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN .	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Angkutan Penyeberangan .	90 persen
						Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota .	Persentase Layanan sarana angkutan laut yang laik operasi (%) .	80 persen
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota .	Presentase pemenuhan layanan Angkutan Laut Kapal Roro KMP Nusa Jaya Abadi yang laik operasi .	80 persen
						Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota .	Pengembangan prasarana dan teknologi Perhubungan yang dilaksanakan .	100 persen
						Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota .	Inovasi Teknologi Perhubungan yang dilaksanakan .	100 persen

			2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal .	terpenuhinya prasarana pelabuhan sesuai standar .	80 persen
			2	15	3	2.12	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal .	Tersedianya dokumen perencanaan Pelabuhan Pengumpan Lokal .	80 persen
			2	15	3	2.12	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal .	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan .	85 persen
			2	15	3	2.12	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal .	terpenuhinya pengelolaan prasarana teknis pelabuhan nusa penida .	100 persen
			2	15	3	2.12	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal .	Terpenuhinya pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal .	75 persen

Tabel 2.2
 Program dan Kegiatan Beserta Kebutuhan Pendanaan Tahun 2022 (Anggaran Induk Tahun 2022)

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			26.310.451.608,00
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	20 Poin	10.750.410.508,00
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Poin	0,00
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaranperangkat daerah tersusun tepat waktu	9 dok	0,00
2.15.01.2.01.07	Evaliasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah terkirim tepat waktu	24 lap	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu	3 lap	8.853.606.482,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	13 bulan	8.853.606.482,00
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD tersusun tepat waktu	14 lap	0,00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	95%	0,00
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100%	1.896.804.026,00
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	90%	1.896.804.026,00
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat	100%	0,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	80%	8.172.033.620,00
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	90%	0,00
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan manajemen Lalu Lintas	100%	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	80%	3.641.803.620,00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Lau Lintas di Jalan Kabupaten	70%	3.246.108.900,00
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpenuhinya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten	85%	395.694.720,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terpenuhinya Pengelolaan Prasarana Terminal Tipe C	80%	77.430.000,00
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terpenuhinya Pengelolaan Terminal Tipe C	90%	77.430.000,00
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Terpenuhinya Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal C	85%	0,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terpenuhinya Pengelolaa Prasarana Parkir di Kabupaten	80%	302.800.000,00
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terpenuhinya Penyelenggaraan dan Pengembangan Pengelolaan Parkir Kewenangan Kabupaten	90%	302.800.000,00
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	90%	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten	100%	0,00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	80%	0,00

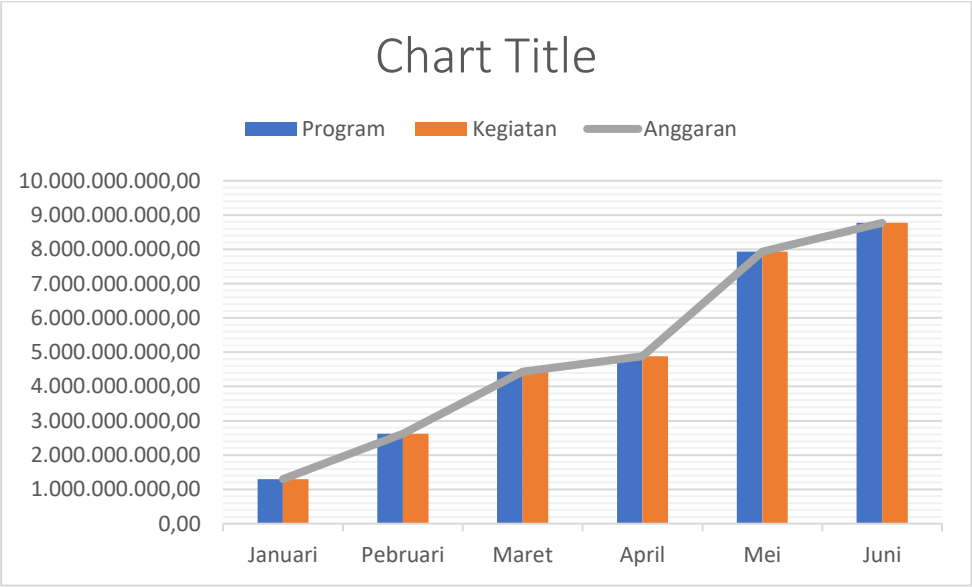
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemenuhan Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor	85%	0,00
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	0,00
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor Berjalan dengan Baik	100%	0,00
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	80%	0,00
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya Pengujian Kendaraan Bermotor Di Nusa Penida dan Nusa Lembongan	100%	0,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan	80%	0,00
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Presentase Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	70%	0,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Presentase Pemenuhan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	80%	66.119.100,00
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terpenuhinya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	95%	0,00
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Kebijakan norma, stardar dan prosedur bidang lingkungan Perhubungan dalam Penilaian WTN	70%	0,00
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Presentase Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Yang diLaksanakan	80%	0,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Layanan Angkutan Umum Dalam Kab. Klungkung	80%	4.150.000.000,00
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Angkutan Umum Darat/Angsis dalam Kabupaten Klungkung	75%	4.100.000.000,00
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum dalam 1 Kabupaten	100%	50.000.000,00
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	80%	0,00
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	80%	0,00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Angkutan Penyeberangan	75%	7.388.007.480,00
2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Sarana Angkutan Laut yang Laik Oprasi (%)	80%	6.952.360.080,00
2.15.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan layanan Angkutan Laut Kapal Roro KMP Nusa Jaya Abadi yang laik operasi	80%	6.952.360.080,00
2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Izin Usaha Angkutan Laut	100%	0,00
2.15.03.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran rakyat kewenangan Kabupaten	100%	0,00
2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Pengembangan Prasarana dan teknologi Perhubungan yang Dilaksanakan	75%	0,00

2.15.03.2.06.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inovasi Teknologi Perhubungan yang dilaksanakan	80%	0,00
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpenuhinya Prasarana Pelabuhan Sesuai Standar	80%	435.647.400,00
2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersediannya Dokumen Perencanaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	85%	0,00
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Presentase Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyebrangan	90%	0,00
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpenuhinya Pengelolaan Teknis Pelabuhan Nusa Penida	100%	180.582.000,00
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpenuhinya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	75%	255.065.400,00

Pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja pada Bidang urusan perhubungan telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dimana dalam pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan melalui pelaksanaan 3 program dan 17 kegiatan dan 34 sub kegiatan, dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 72,27 persen, rata-rata capaian kinerja output kegiatan adalah sebesar 58,41 persen, dan rata-rata capaian kinerja output sub kegiatan adalah sebesar 51,62
- b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.770.931.015,00 atau sebesar 33,34 persen dengan predikat “SR.” dari total anggaran sebesar Rp 26.310.451.608,00

Grafik. 2.1
Realisasi Anggaran, Program dan Kegiatan
sampai dengan Triwulan II Tahun 2022



Tabel. 2.3.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dishub dan
Pencapaian Renstra Dishub s/d Tahun 2022 (Triwulan II)
Kabupaten Klungkung

NO.			KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA				
P.	K.	SK.							RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	INDIKATOR (SATUAN)		RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
			2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26.310.451.608,00	8.770.931.015,00	33,34					
			2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	26.310.451.608,00	8.770.931.015,00	33,34					
1.			2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.750.410.508,00	5.183.641.935,00	48,22	Indek Reformasi Birokrasi (poin)		21	21,88	104,19
	1.		2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)		86	82,29	95,69
		1.	2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	jumlah dokumen anggaran dan perencanaan perangkat daerah tersusun tepat waktu (dokumen)		9	4	44,44
		2.	2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah terkirim tepat waktu (laporan)		24	12	50
	2.		2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.853.606.482,00	4.397.354.780,00	49,67	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu (laporan)		3	1	33,33
		3.	2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.853.606.482,00	4.397.354.780,00	49,67	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN (bulan)		13	6	46,15
		4.	2	15	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD tersusun tepat waktu (laporan)		14	8	57,14
	3.		2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	Tingkat Disiplin Aparatur (persen)		95	95,5	100,53
		5.	2	15	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu (persen)		100	55	55
	4.		2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.896.804.026,00	786.287.155,00	41,45	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (persen)		100	49,98	49,98
		6.	2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.896.804.026,00	786.287.155,00	41,45	Persentasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor (persen)		90	50	55,56
		7.	2	15	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat (persen)		100	49,98	49,98
2.			2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.172.033.620,00	2.574.223.396,00	31,5	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Persen)		90	45,65	50,72

	5.		2	15	2	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	0	Persentase pemenuhan jaringan LLAJ Kabupaten (persen)	90	45,65	50,72
		8.	2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	0	Persentase pemenuhan manajemen lalu lintas (persen)	100	50	50
	6.		2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.641.803.620,00	1.742.050.925,00	47,83	Persentase pemenuhan perlengkapan jalan di jalan kabupaten (persen)	60	30	50
		9.	2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.246.108.900,00	1.705.630.925,00	52,54	persentase pemenuhan fasilitas lalu lintas di jalan kabupaten (persen)	60	30	50
		10.	2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	395.694.720,00	36.420.000,00	9,2	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan jalan di kabupaten (persen)	80	45,65	57,06
	7.		2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	77.430.000,00	24.398.100,00	31,51	Terpenuhinya pengelolaan prasarana terminal tipe C (persen)	80	49,98	62,47
		11.	2	15	2	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	77.430.000,00	24.398.100,00	31,51	Terpenuhinya pengelolaan terminal tipr C (persen)	75	40,02	53,36
		12.	2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	0	0	0	Terpenuhinya pembangunan dan pemeliharaan terminal Tipe C (persen)	75	0	0
	8.		2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	302.800.000,00	116.897.700,00	38,61	Terpenuhinya pengelolaan prasarana parkir di kabupaten (persen)	80	49,98	62,47
		13.	2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	302.800.000,00	116.897.700,00	38,61	Terpenuhinya penyelenggaraan dan pengembangan pengelolaan parkir kewenangan kabupaten (persen)	80	33,35	41,69
		14.	2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	Terpenuhinya pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten (persen)	75	0	0
	9.		2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	Persentase pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji di kabupaten (persen)	100	100	100
		15.	2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor (persen)	80	80	100
		16.	2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	Pemenuhan sumber daya manusia pengujian kendaraan bermotor (persen)	85	50	58,82
		17.	2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (persen)	100	33	33
		18.	2	15	2	2.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	Strandar Operasional Prosedur Pengujian Berjalan dengan baik (persen)	100	50	50
		19.	2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (persen)	80	80	100

		20.	2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	Terselenggaranya Pengujian Kendaraan bermotor di Nusa Penida dan Nusa Lembongan (persen)	100	44	44
	10.		2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	Persentase Persetujuan Hasil Andalali untuk Jalan Kabupaten (persen)	70	35	50
		21.	2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	0	0	0	Presentase Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin (persen)	70	35	50
	11.		2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0	0	0	Persentase pemenuhan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan (persen)	80	50	62,5
		22.	2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0	0	0	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Norma Standar dan Prosudur Bidang Lingkungan Perhubungan dalam Penilaian WTN (%) (persen)	70	50,04	71,49
		23.	2	15	2	2.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	0	0	Presentase sosialisasi keselamatan Lalu Lintas yang diLaksanakan (%) (persen)	80	66,64	83,3
	12.		2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.150.000.000,00	690.876.671,00	16,65	Persentase pemenuhan layanan Angkutan Umum dalam Kab. Klungkung (persen)	80	80,63	100,79
		24.	2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.100.000.000,00	690.876.671,00	16,85	Persentase pemenuhan layanan Angkutan Umum Darat/Angsis dalam Kab. Klungkung (persen)	70	78,85	112,64
		25.	2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0	0	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum dalam 1 Kabupaten (persen)	100	50	50
	13.		2	15	2	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	Persentase pemenuhan layanan angkutan perkotaan dalam 1 kabupaten (persen)	80	45,45	56,81
		26.	2	15	2	2.10	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	Terlaksananya sosialisasi kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten (persen)	80	60	75
3.			2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	7.388.007.480,00	1.013.065.684,00	13,71	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Angkutan Penyeberangan (Persen)	90	55,7	61,89
	14.		2	15	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	6.952.360.080,00	842.031.296,00	12,11	Persentase Layanan sarana angkutan laut yang laik operasi (%) (persen)	80	47,4	59,25
		27.	2	15	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	6.952.360.080,00	842.031.296,00	12,11	Presentase pemenuhan layanan Angkutan Laut Kapal Roro KMP Nusa Jaya Abadi yang laik operasi (persen)	80	50,5	63,13

	15.		2	15	3	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	0	0	0	Pengembangan prasarana dan teknologi Perhubungan yang dilaksanakan (persen)	100	0	0
		28.	2	15	3	2.06	1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	Inovasi Teknologi Perhubungan yang dilaksanakan (persen)	100	0	0
	16.		2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	435.647.400,00	171.034.388,00	39,26	terpenuhinya prasarana pelabuhan sesuai standar (persen)	80	0	0
		29.	2	15	3	2.12	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	Tersedianya dokumen perencanaan Pelabuhan Pengumpan Lokal (persen)	80	0	0
		30.	2	15	3	2.12	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan (persen)	85	0	0
		31.	2	15	3	2.12	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	180.582.000,00	144.684.188,00	80,12	terpenuhinya pengelolaan prasarana teknis pelabuhan nusa penida (persen)	100	100	100
		32.	2	15	3	2.12	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	255.065.400,00	26.350.200,00	10,33	Terpenuhinya pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal (persen)	75	37,5	50
Total Program									3	Rata - Rata Capaian Program					72,27
Total Kegiatan									16	Rata - Rata Capaian Kegiatan					58,41
Total Sub Kegiatan									32	Rata - Rata Capaian Sub Kegiatan					51,62
JUMLAH									Rp. 26.310.451.608,00			Rp. 8.770.931.015,00		33,34	
SISA												Rp. 17.539.520.593,00		66,66	

Dari hasil evaluasi terhadap tabel 2.3 diatas maka dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan yaitu meliputi beberapa faktor :
 - a. Terjadinya bencana nasional berupa Pandemi Covid-19 menyebabkan tidak tercapainya beberapa target kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Dishub Tahun 2022.
 - b. Pengurangan anggaran kegiatan terkait refocusing anggaran covid-19 mengakibatkan tidak dapat berjalannya pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada Renja Perangkat Daerah Dishub Tahun 2022.
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu meliputi :
 - a. Melakukan penghematan anggaran terkait adanya refocusing anggaran covid-19 dengan menggunakan skala prioritas kegiatan mana saja yang bisa dilakukan penundaan dan mana yang harus dilaksanakan, dengan sebisa mungkin untuk tidak mengurangi target kinerja kegiatan yang sudah direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah.
 - b. Refocusing anggaran dilaksanakan dengan rasionalisasi belanja Makan Minum Rapat, Perjalanan Dinas, Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja BBM, pemeliharaan sarpras, dan Sesajen.
 - c. Penerapan tatanan kehidupan era baru di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dengan kegiatan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat-tempat Layanan Perhubungan, pengecekan suhu tubuh dan penyediaan tempat cuci tangan
 - d. Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan per triwulan.
 - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Target Kinerja setiap Triwulan.

2.2. Permasalahan Pelayanan PD

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dishub Tahun 2022 terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Urusan Perhubungan.
2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.

3. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD berdasarkan Analisa S W O T

- **Analisis Lingkungan Internal**

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)

Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perhubungan.

b. Kelemahan (Weakness)

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi:

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan di wilayah Kabupaten Klungkung dalam mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya diperlukan tenaga pelayanan perhubungan yang handal, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah Kabupaten juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.
2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana

prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu diwujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Perhubungan. Pelayanan sektor perhubungan memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan baik melalui APBD maupun APBN.
4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama.

- **Analisis Lingkungan Eksternal**

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung meliputi :

a. Peluang (Opportunity)

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat (DAK dan APBN), sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
2. Posisi geostrategis Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di Wilayah Bali Timur;
3. Keberadaan jaringan transportasi laut sebagai modal pengembangan transportasi Kabupaten Klungkung, yaitu Rencana Pengadaan Pelabuhan Segitiga emas;
4. Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam mengembangkan berbagai moda transportasi. Hal tersebut membuka peluang percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung;
5. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perhubungan.

b. Ancaman (Treath)

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Disiplin pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan;
2. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan kerusakan umur teknis jalan;
3. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan;
4. Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien;
5. Masih adanya kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mengakibatkan rawannya konflik kepentingan;
6. Belum optimalnya pelayanan angkutan laut antar pulau, mengakibatkan rendahnya mobilitas dan terhambatnya pertumbuhan daerah;
7. Belum optimalnya pengelolaan perizinan di bidang perhubungan, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Klungkung.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DISHUB KABUPATEN KLUNGKUNG

3.1 Perubahan Target Kinerja Prioritas PD

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala (S.W.O.T) yang ada atau yang mungkin timbul selama kegiatan itu berjalan. Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung tahun 2021 telah tertuang dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 yang berisi tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan selama lima tahun.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dipakai sebagai acuan atau panduan bagi seluruh Bidang di lingkup Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Rencana Strategis ini juga merupakan komitmen dan tekad Dinas Perhubungan untuk berperan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Klungkung sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023. Pada tahap selanjutnya, dokumen Rencana Strategis ini dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan dimana berfungsi sebagai pegangan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dishub Kabupaten Klungkung dalam setiap tahunnya.

Sesuai dengan pedoman yang berlaku, rumusan materi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung periode 2018-2023 meliputi Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan serta sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Visi dan Misi Kabupaten

Memasuki pembangunan Kabupaten Klungkung pada periode lima tahun (2018-2023), Kabupaten Klungkung sebagai salah satu pelaku pembangunan ingin mewujudkan pencapaian Misi **”TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”**. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kabupaten Klungkung pada periode 2018-2023. Rakyat Klungkung yang Unggul dan Sejahtera diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan pemerintah daerah, yang dalam penafsirannya diantaranya dapat diartikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat pada seluruh lini yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kecukupan lahir dan batin masyarakat Klungkung.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dituntut untuk mampu mewujudkan Visi Pembangunan Klungkung 2018-2023 yang selaras dengan Tupoksi Dinas Perhubungan, melalui penetapan Tujuan dan Sasaran kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dan sejalan dengan isu strategis yang dihadapi.

Misi Kepala Daerah Kabupaten Klungkung periode 2018 – 2023 yaitu :

- (1). Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya
- (2). Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- (3). Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan
- (4). Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dgn menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik
- (5). Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dgn tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yaitu Misi ke-5 : “Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup”, dengan tetap berorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Perhubungan kepada masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubugan Tahun 2018-2023 dirumuskan dengan berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, dimana Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan telah diselaraskan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Penjabaran Tujuan, Sasaran RPJMD
Tahun 2018-2023 dalam Urusan Perhubungan

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi Awal 2018	Target Capaian (%)					Kondisi Akhir (%)
					2019	2020	2021	2022	2023	
Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat	$\frac{\sum \text{Penumpang Angk. Darat Th. } n - (n-1) \times 100\%}{\sum \text{Penumpang Angkutan Darat Th. } (n-1)}$	454.220 orang	4	10	5	5	5	29
		Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut	$\frac{\sum \text{Penumpang Angk. Laut Th. } n - (n-1) \times 100\%}{\sum \text{Penumpang Angkutan Laut Th. } (n-1)}$	2.226.214 orang	5	5	5	5	5	25

Dengan kesesuaian Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD dan Renstra PD Dishub maka. Maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung juga mendukung Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Keselarasan Hubungan antara Tujuan Sasaran RPJMD dan Tujuan Sasaran OPD dalam Bidang Perhubungan

Tujuan RPJMD	Tujuan OPD
Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Perhubungan
Sasaran RPJMD	Sasaran OPD
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan
Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan dan Sasaran OPD
Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat (%)	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat (%)
Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (%)	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (%)

3.2 Perubahan Program dan Kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dishub 2022

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Dalam Perubahan Renja Tahun 2022 ini tidak terdapat perubahan indikator baik Program maupun kegiatan. Dimana secara singkat dapat dijelaskan dalam table 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Dishub Tahun 2022

SASARAN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG	KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) RENJA 2022		KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN RENJA 2022	
		Indikator/ Satuan	Indikator/ Satuan	Rencana	Indikator/ Satuan
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	21 Poin	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	21 Poin
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Poin	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Poin
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaranperangkat daerah tersusun tepat waktu	9 dok	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaranperangkat daerah tersusun tepat waktu	9 dok
	Evaliasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah terkirim tepat waktu	24 lap	Jumlah Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah terkirim tepat waktu	24 lap
	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu	3 lap	Jumlah Laporan Keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu	3 lap
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	13 bulan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	13 bulan

Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD tersusun tepat waktu	14 lap	jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD tersusun tepat waktu	14 lap
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	95%	Tingkat Disiplin Aparatur	95%
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100%	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	90%	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	90%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat	100%	Cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	90%	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	90%
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Jaringan LLAJ Kabupaten	90%	Prosentase Pemenuhan Jaringan LLAJ Kabupaten	90%
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan manajemen Lalu Lintas	100%	Persentase pemenuhan manajemen Lalu Lintas	100%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	60%	Presentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	60%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Lau Lintas di Jalan Kabupaten	60%	Persentase Pemenuhan Fasilitas Lau Lintas di Jalan Kabupaten	60%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpenuhinya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten	80%	Terpenuhinya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten	80%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terpenuhinya Pengelolaan Prasarana Terminal Tipe C	80%	Terpenuhinya Pengelolaan Prasarana Terminal Tipe C	80%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	erpenuhinya Pengelolaan Terminal Tipe C	75%	erpenuhinya Pengelolaan Terminal Tipe C	75%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Terpenuhinya Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal C	75%	Terpenuhinya Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal C	75%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terpenuhinya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Parkir di Kabupaten	80%	Terpenuhinya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Parkir di Kabupaten	80%
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Perpenuhinya Penyelenggaraan dan Pengembangan Pengelolaan Parkir Kewenangan Kabupaten	80%	Perpenuhinya Penyelenggaraan dan Pengembangan Pengelolaan Parkir Kewenangan Kabupaten	80%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	75%	Terpenuhinya Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	75%
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten	100%	Prosentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten	100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	80%	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	80%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemenuhan Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor	85%	Pemenuhan Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor	85%
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor Berjalan dengan Baik	100%	Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor Berjalan dengan Baik	100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	80%	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	80%

Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya Pengujian Kendaraan Bermotor Di Nusa Penida dan Nusa Lembongan	100%	Terselenggaranya Pengujian Kendaraan Bermotor Di Nusa Penida dan Nusa Lembongan	100%
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Persetujuan Hasil Andalin Untuk Jalan Kabupaten	70%	Presentase Persetujuan Hasil Andalin Untuk Jalan Kabupaten	70%
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	Presentase Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	70%	Presentase Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	70%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Presentase Pemenuhan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	80%	Presentase Pemenuhan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	80%
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan norma, stardar dan prosedur bidang lingkungan Perhubungan dalam Penilaian WTN	70%	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan norma, stardar dan prosedur bidang lingkungan Perhubungan dalam Penilaian WTN	70%
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Presentase Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Yang diLaksanakan	80%	Presentase Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Yang diLaksanakan	80%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Layanan Angkutan Umum Dalam Kab. Klungkung	80%	Presentase Pemenuhan Layanan Angkutan Umum Dalam Kab. Klungkung	80%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Angkutan Umum Darat/Angsis dalam Kabupaten Klungkung	70%	Persentase Pemenuhan Layanan Angkutan Umum Darat/Angsis dalam Kabupaten Klungkung	70%
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum dalam 1 Kabupaten	100%	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum dalam 1 Kabupaten	100%
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Layanan Angkutan Umum Perkotaan dalam 1 Kabupaten	80%	Presentase Pemenuhan Layanan Angkutan Umum Perkotaan dalam 1 Kabupaten	80%
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten	80%	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten	80%
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Angkutan Penyeberangan	90%	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Angkutan Penyeberangan	90%
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Sarana Angkutan Laut yang Laik Oprasi (%)	80%	Presentase Layanan Sarana Angkutan Laut yang Laik Oprasi (%)	80%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan layanan angkutan laut Kapal Roro KMP. Nusa Jaya Abadi yang laik operasi	80%	Persentase Pemenuhan layanan angkutan laut Kapal Roro KMP. Nusa Jaya Abadi yang laik operasi	80%
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Pengembangan Prasarana dan teknologi Perhubungan yang Dilaksanakan	100%	Pengembangan Prasarana dan teknologi Perhubungan yang Dilaksanakan	100%
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inovasi Teknologi Perhubungan yang dilaksanakan	100%	Inovasi Teknologi Perhubungan yang dilaksanakan	100%
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Loka	Terpenuhinya Prasaran Pelabuhan Sesuai Standar	80%	Terpenuhinya Prasaran Pelabuhan Sesuai Standar	80%
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersediannya Dokumen Perencanaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	80%	Tersediannya Dokumen Perencanaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	80%

	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Presentase Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyebrangan	85%	Presentase Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyebrangan	85%
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Loka	Terpenuhinya Pengelolaan Teknis Pelabuhan Nusa Penida	100%	Terpenuhinya Pengelolaan Teknis Pelabuhan Nusa Penida	100%
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpenuhinya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	75%	Terpenuhinya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	75%

Tabel. 3.4.
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2022

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDUK TAHUN 2022			PERUBAHAN TAHUN 2022			CATATAN
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	7	8	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			26.310.451.608,00			27.216.998.466	
2	15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	21 Poin	10.750.410.508,00	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	21 Poin	11.066.958.566	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Poin	0,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Poin	361.800	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaranperangkat daerah tersusun tepat waktu	9 dok	0,00	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaranperangkat daerah tersusun tepat waktu	9 dok	180.900	Penambahan ATK
2	15	01	2.01	07	Evaliasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah terkirim tepat waktu	24 lap	0,00	Jumlah Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah terkirim tepat waktu	24 lap	180.900	Penambahan ATK
2	15	01	2.02		Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu	3 lap	8.853.606.482,00	Jumlah Laporan Keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu	3 lap	9.169.612.740	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	13 bulan	8.853.606.482,00	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	13 bulan	9.169.612.740	Penambahan anggaran belanja pegawai (gaji dan tunjangan)
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD tersusun tepat waktu	14 lap	0,00	jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD tersusun tepat waktu	14 lap	0,00	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	95%	0,00	Tingkat Disiplin Aparatur	95%	180.900	
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	0,00	persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	180.900	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100%	1.896.804.026,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100%	1.896.804.026,00	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	90%	1.896.804.026,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	90%	1.896.804.026,00	
2	15	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat	100%	0,00	Cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat	100%	0,00	

2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	90%	8.172.033.620,00	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	90%	8.492.031.520,00	
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Jaringan LLAJ Kabupaten	90%	0,00	Prosentase Pemenuhan Jaringan LLAJ Kabupaten	90%	0,00	
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan manajemen Lalu Lintas	100%	0,00	Persentase pemenuhan manajemen Lalu Lintas	100%	0,00	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	60%	3.641.803.620,00	Presentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	60%	3.961.801.520	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Lau Lintas di Jalan Kabupaten	60%	3.246.108.900,00	Persentase Pemenuhan Fasilitas Lau Lintas di Jalan Kabupaten	60%	3.496.106.800	Penambahan pagu belanja pembayaran tenaga listrik untuk keperluan LPJU
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpenuhinya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten	80%	395.694.720,00	Terpenuhinya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten	80%	465.694.720	Penambahan pagu belanja pemeliharaan papan nama jalan
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terpenuhinya Pengelolaan Prasarana Terminal Tipe C	80%	77.430.000,00	Terpenuhinya Pengelolaan Prasarana Terminal Tipe C	80%	77.430.000,00	
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	erpenuhinya Pengelolaan Terminal Tipe C	75%	77.430.000,00	erpenuhinya Pengelolaan Terminal Tipe C	75%	77.430.000,00	
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Terpenuhinya Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal C	75%	0,00	Terpenuhinya Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal C	75%	0,00	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terpenuhinya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Parkir di Kabupaten	80%	302.800.000,00	Terpenuhinya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Parkir di Kabupaten	80%	302.800.000,00	
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Perpenuhinya Penyelenggaraan dan Pengembangan Pengelolaan Parkir Kewenangan Kabupaten	80%	302.800.000,00	Perpenuhinya Penyelenggaraan dan Pengembangan Pengelolaan Parkir Kewenangan Kabupaten	80%	302.800.000,00	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	75%	0,00	Terpenuhinya Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	75%	0,00	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten	100%	0,00	Prosentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten	100%	0,00	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	80%	0,00	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	80%	0,00	
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemenuhan Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor	85%	0,00	Pemenuhan Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor	85%	0,00	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	0,00	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	0,00	

2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor Berjalan dengan Baik	100%	0,00	Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor Berjalan dengan Baik	100%	0,00	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	80%	0,00	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	80%	0,00	
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya Pengujian Kendaraan Bermotor Di Nusa Penida dan Nusa Lembongan	100%	0,00	Terselenggaranya Pengujian Kendaraan Bermotor Di Nusa Penida dan Nusa Lembongan	100%	0,00	
2	15	02	2.07		Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Persetujuan Hasil Andalalin Untuk Jalan Kabupaten	70%	0,00	Presentase Persetujuan Hasil Andalalin Untuk Jalan Kabupaten	70%	0,00	
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Presentase Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	70%	0,00	Presentase Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	70%	0,00	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Presentase Pemenuhan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	80%	0,00	Presentase Pemenuhan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	80%	0,00	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Kebijakann Kebijakan norma, stardar dan prosedur bidang lingkungan Perhubungan dalam Penilaian WTN	70%	0,00	Presentase Pelaksanaan Kebijakann Kebijakan norma, stardar dan prosedur bidang lingkungan Perhubungan dalam Penilaian WTN	70%	0,00	
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Presentase Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Yang diLaksanakan	80%	0,00	Presentase Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Yang diLaksanakan	80%	0,00	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Layanan Angkutan Umum Dalam Kab. Klungkung	80%	4.150.000.000,00	Presentase Pemenuhan Layanan Angkutan Umum Dalam Kab. Klungkung	80%	4.150.000.000,00	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Angkutan Umum Darat/Angsis dalam Kabupaten Klungkung	70%	4.150.000.000,00	Persentase Pemenuhan Layanan Angkutan Umum Darat/Angsis dalam Kabupaten Klungkung	70%	4.150.000.000,00	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum dalam 1 Kabupaten	100%	50.000.000	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum dalam 1 Kabupaten	100%	50.000.000	
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Layanan Angkutan Umum Perkotaan dalam 1 Kabupaten	80%	0,00	Presentase Pemenuhan Layanan Angkutan Umum Perkotaan dalam 1 Kabupaten	80%	0,00	
2	15	02	2.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten	80%	0,00	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten	80%	0,00	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Angkutan Penyeberangan	90%	7.388.007.480,00	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Angkutan Penyeberangan	90%	7.388.007.480,00	

2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Sarana Angkutan Laut yang Laik Oprasi (%)	80%	6.952.360.080,00	Presentase Layanan Sarana Angkutan Laut yang Laik Oprasi (%)	80%	7.222.360.080	
2	15	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan layanan angkutan laut Kapal Roro KMP. Nusa Jaya Abadi yang laik operasi	80%	6.952.360.080,00	Persentase Pemenuhan layanan angkutan laut Kapal Roro KMP. Nusa Jaya Abadi yang laik operasi	80%	7.222.360.080	Penambahan pagu belanja BBM solar bersubsidi, sewa sarana mobilitas darat BBM, dan belanja service/peralatan saat operasi
2	15	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Pengembangan Prasarana dan teknologi Perhubungan yang Dilaksanakan	100%	0,00	Pengembangan Prasarana dan teknologi Perhubungan yang Dilaksanakan	100%	0,00	
2	15	03	2.06	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inovasi Teknologi Perhubungan yang dilaksanakan	100%	0,00	Inovasi Teknologi Perhubungan yang dilaksanakan	100%	0,00	
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Loka	Terpenuhinya Prasaran Pelabuhan Sesuai Standar	80%	435.647.400,00	Terpenuhinya Prasaran Pelabuhan Sesuai Standar	80%	435.647.400,00	
2	15	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersediannya Dokumen Perencanaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	80%	0,00	Tersediannya Dokumen Perencanaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	80%	0,00	
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Presentase Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyebrangan	85%	0,00	Presentase Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyebrangan	85%	0,00	
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Loka	Terpenuhinya Pengelolaan Teknis Pelabuhan Nusa Penida	100%	180.582.000,00	Terpenuhinya Pengelolaan Teknis Pelabuhan Nusa Penida	100%	180.582.000,00	
2	15	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpenuhinya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	75%	255.065.400,00	Terpenuhinya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	75%	255.065.400,00	

Perubahan Renja PD Dishub tahun 2022 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
3. Refocusing Anggaran Tahun 2022 terkait penanganan Pandemi Covid-19

Perubahan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan Tujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi dan makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Kebutuhan pendanaan Perangkat Daerah Dishub Kabupaten Klungkung pada Perubahan Renja Tahun 2022 bertambah sebesar Rp. 906.546.858,00 Atau bertambah 3,44%, dimana Anggaran di Induk Tahun 2022 sebesar Rp. 26.310.451.608,00 sedangkan Perubahan Renja Tahun 2022 sebesar Rp. 27.216.998.466,00. Penambahan ini terutama dikarenakan adanya penyesuaian dari tarif tenaga listrik (*tarif adjustment*), dan penyesuaian terhadap harga BBM.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Dishub Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dimana menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga harus digunakan untuk tahun berjalan, Pergeseran kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Alokasi anggaran pada Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2022 untuk belanja langsung (selain gaji) sebesar Rp. 17.456.845.126,00 dan dalam perubahan renja Tahun 2022 bertambah menjadi Rp. 18.047.385.726,00. Terjadi penambahan sebesar Rp. 906.546.858,00 atau bertambah 3,44%. Penambahan ini terutama dikarenakan adanya penyesuaian dari tarif tenaga listrik (*tarif adjustment*), dan penyesuaian terhadap harga BBM. Dengan telah tersusunnya Perubahan Renja PD Dishub Tahun 2022 maka dapat dicapai tujuan perubahan renja yaitu untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Selain dari tujuan tersebut dengan telah tersusunnya Perubahan Renja 2022 maka dapat menjadi acuan resmi bagi PD Dishub dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada tahun berjalan dengan kebutuhan yang Riil/sebenarnya berdasarkan analisa kebutuhan.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 Dishub Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA